

PP39

TRIWULAN I 2025



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia
T. (024) 8316315, 8314312 F. (024)8414811 HP. 082134525006
e. bbspjppi.kemenperin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan I tahun 2025 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan IV Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2025 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, April 2025


Kepala BBSPJPI
Dr. Sidik Herman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
1.3. Struktur Organisasi	4
Bab. II Rencana Kegiatan	7
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2024	7
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	14
Bab. III Pelaksanaan Kegiatan	20
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	41
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan	93
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	102
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	102
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan.....	103
3.3. Langkah Tindak Lanjut	104
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja.....	104
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan.....	105
Bab. IV Penutup	107
4.1. Realisasi Kegiatan	107
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	108
4.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	109
Lampiran 1: Form Rencana Aksi	
Lampiran 2: Form Pengukuran Rencana Aksi	
Lampiran 3: SMART DJA	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi,

produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha

yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan , program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

BAB. II

RENCANA KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPI 2025-2029, Visi BBSPJPI adalah "*Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing*". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPI melaksanakan Misi "*Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*". Berkenaan dengan misi BBSPJPI di atas, kedepannya BBSPJPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi Anggaran BBSPJPI Tahun 2025. Efisiensi ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNB/BLU sebesar Rp 4.671.500.000. Pagu efektif BBSPJPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan

d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.

Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I
Anggaran BBSPJPPI	36.159.131.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPI Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I		
	Total	Blokir	Efektif
Anggaran BBSPJPI	36.159.131.000	6.589.339.000	29.569.792.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000	3.325.646.000	9.334.260.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	3.325.646.000	9.334.260.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	273.802.000	283.410.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	1.290.119.000	7.465.480.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.761.725.000	1.585.370.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	3.263.693.000	20.249.032.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000	3.263.693.000	20.235.532.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.647.839.000	19.424.305.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000	201.735.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000	406.518.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000	202.974.000

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp.)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	283.410.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	8.755.599.000	7.465.480.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.585.370.000
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	19.424.305.000
5	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	201.735.000
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	406.518.000
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	202.974.000
Total			36.159.131.000	29.569.792.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-4 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12.659.906.000	9.334.260.000	
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	9.334.260.000	
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	283.410.000	
013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	557.212.000	283.410.000	
051	<i>Sosialisasi Layanan Jasa Teknis</i>	285.484.000	171.109.000	BLU
A	Temu Pelanggan	285.484.000	171.109.000	
052	<i>Publikasi Layanan Jasa Teknis</i>	271.728.000	112.301.000	BLU
A	Promosi	228.696.000	88.251.000	
B	Pameran	43.032.000	24.050.000	
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	7.465.480.000	
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	6.390.307.000	5.185.776.000	
051	<i>Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</i>	6.200.577.000	5.125.340.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian	2,227,752,000	1.210.752.000	
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3,202,825,000	3.202.825.000	
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi	770,000,000	711.763.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	189.730.000	60.436.000	BLU
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	524.236.000	475.736.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	462.920.000	462.920.000	BLU
A	Layanan Kalibrasi	462.920.000	462.920.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000	12.816.000	BLU
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000	12.816.000	
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000	940.140.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	714.700.000	714.700.000	BLU
A	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	72.600.000	72.600.000	
B	Layanan Sertifikasi Produk	508.560.000	508.560.000	
C	Layanan Sertifikasi Industri Hijau	38.460.000	38.460.000	
D	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	14.160.000	14.160.000	
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal	37.000.000	37.000.000	
F	Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri	43.920.000	43.920.000	
052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	225.440.000	BLU
A	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	225.440.000	
055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000	217.110.000	
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000	217.110.000	BLU
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000	217.110.000	
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000	28.668.000	
051	Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	28.668.000	28.668.000	BLU
A	Layanan Verifikasi TKDN	28.668.000	28.668.000	
057	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	462.382.000	462.382.000	
051	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan	367.080.000	367.080.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
	<i>Teknologi Industri</i>			
A.	Konsultasi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	155.190.000	155.190.000	
B.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	211.890.000	211.890.000	
052	<i>Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri</i>	95.302.000	95.302.000	BLU
A.	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000	95.302.000	A.
096	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	155.668.000	155.668.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	112.000.000	112.000.000	BLU
A.	Penyelenggara Uji Profisiensi	112.000.000	112.000.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000	43.668.000	BLU
A.	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000	43.668.000	
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.585.370.000	
013	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.347.095.000	1.585.370.000	
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	3.347.095.000	1.585.370.000	BLU
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.347.095.000	1.585.370.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	20.235.532.000	
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	23.499.225.000	20.235.532.000	
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	19.424.305.000	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	333.528.000	103.528.000	
051	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	103.528.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	103.528.000	
962	Layanan Umum	73.958.000	73.958.000	
051	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	73.958.000	73.958.000	BLU
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	73.958.000	73.958.000	
994	Layanan Perkantoran	19.246.819.000	19.246.819.000	
001	Gaji dan Tunjangan	14.982.432.000	14.982.432.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14.982.432.000	14.982.432.000	
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	369.943.000	369.943.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.682.226.000	4.264.387.000	RM/BLU
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	3.191.858.000	2.187.201.000	RM/BLU
B	Langganan Daya Dan Jasa	916.200.000	612.638.000	RM/BLU
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	717.570.000	717.570.000	RM/BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	269.540.000	177.000.000	RM/BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	225.000.000	225.000.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	111.258.000	94.178.000	RM/BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik	51.000.000	51.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.474.826.000	201.735.000	
951	Layanan Sarana Internal	674.826.000	201.735.000	
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	35.000.000	0	RM
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	298.266.000	0	RM
053	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	341.560.000	201.735.000	BLU
971	Layanan Prasarana Internal	800.000.000	0	
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	800.000.000	0	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	294.006.000	406.518.000	
954	Layanan Manajemen SDM	256.252.000	53.188.000	
051	Pengelolaan/Manajemen SDM	256.252.000	53.188.000	RM/BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	444.272.000	353.330.000	
051	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	444.272.000	353.330.000	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	60.160.000	60.160.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	28.990.000	28.990.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	355.122.000	264.180.000	RM/BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	202.974.000	
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	45.906.000	45.906.000	
051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	45.906.000	45.906.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000	44.061.000	
051	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	44.061.000	44.061.000	BLU
955	Layanan Manajemen Keuangan	129.620.000	106.892.000	
051	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	129.620.000	106.892.000	RM/BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	32.144.000	6.115.000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	32.144.000	6.115.000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industriMigas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
		2.Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score (NPS)
3.Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
	2. Jumlah hasil layanan jasa industri		
	3. Nilai Revenue on Asset (RoA)		
	4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)		
		4. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		rangka menunjang produktivitas Industri	dam/atau jasa pemerintah
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Terwujudnya SDM yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
		2.Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
		3.Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1.Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)			
4.Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		
	2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA		

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPI TA 2025, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	788 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	38 Unit
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
5	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	91 Unit
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	162 Orang
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator Kinerja Utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPI Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	indeks	IKU
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang	960	Perusahaan Industri / Pelaku	IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
		memanfaatkan layanan jasa industri		Usaha / Instansi	
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88	Persen	Non IKU
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	Nilai	Non IKU
3.	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27.71	Persen	Non IKU
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500	Hasil Layanan	Non IKU
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50	Persen	Non IKU
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54.22	Persen	Non IKU
4.	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30	Indeks	Non IKU
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen	Non IKU
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	Non IKU
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.62	Indeks	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
6.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50	Persen	Non IKU
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91.84	Nilai	Non IKU
7.	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	Nilai	Non IKU
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	Nilai	Non IKU
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53	Persen	Non IKU

BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPI Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instans	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	50%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan	75%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan	100%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							evaluasi capaian TW II		evaluasi capaian TW III		evaluasi capaian TW IV.		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persn	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I.	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III.	100%	11. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV.	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholis S), Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi (M. Eddy N)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 Nilai	25%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	50%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	75%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III.	100%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71 persen	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II		5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.		5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.		

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	10%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi	Ketua Kelompok kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.		untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.		untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.		untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV.		
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	25%	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2) Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	50%	1) Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2) Pengembangan Sistem Informasi 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1) Uji Coba Integrasi Sistem 2) Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3) Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3) Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4) Monitoring dan evaluasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	25%	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi.	50%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	25%	1) Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDi. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa	50%	1) Pengembangan/pemutakhiran SINDi. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik	75%	1) Pengembangan/pemutakhiran SINDi. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin		6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3] Penyusunan dan	100%	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan				

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II 2] Mempersiapkan data dukung dan mengupload di link yang telah disediakan	75%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta	100%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta 3] Tindak Lanjut hasil evaluasi penilaian	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Desember 2025
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan	94 nilai	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pematkhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan	50%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pematkhiran RPD	75%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pematkhiran RPD	100%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pematkhiran RPD	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul)	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Anggran IKPA			evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4) Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 6) Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu		Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW II		Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW III		Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW IV	Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	

**LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	53%	30%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum	50%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	75%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	100%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) .	Desember 2025

LAPORAN PP.39 TRIWULAN I
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin sampai dengan Triwulan I TA. 2025, terlihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 : Realisasi Rencana Aksi per Triwulan I Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3.74 indeks	101.63%	25%	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	B.1-3 : 1] Penyebaran kuesioner bulan Januari-Maret 2025 yang kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 37 responden 2] Hasil analisa IKM bulan Januari – Maret berpedoman pada Permen PANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,74 indeks
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	299 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	31.15 %	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi	B1-3 Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 182 b) Kalibrasi = 12 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 5 d) Sertifikasi = 67 e) Inspeksi Teknis = 0

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 0 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 9 j) LPH = 10 k) PUP = 11 l) PBA = 0 m) lainnya = 0
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	88,14%	100,16%	25%	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I.	B1-3 1) SPK yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diterima sampai dengan bulan Januari 2025 = 31 dokumen 2) Perhitungan SPM jasa layanan BBSPJPPI pada bulan Januari – Maret 2025: >Jumlah order 1813 jumlah >sampel sesuai SPM 1598 jadi SLA 88,14%

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 nilai	70	175%	25%	25%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	B1-3: 1] Penyebaran kuesioner kepada 208 responden dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 37 responden 2] Evaluasi nilai NPS Triwulan I 2025 adalah sebesar 70.
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71%	10,65 %	38,43%	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1-3 ➢ Pemberian layanan jasa pelanggan Triwulan I. ➢ Penerimaan (data omspan)Jan-Maret 2025 sebesar Rp 4.249.926.588 dibandingkan penerimaan Jan-Maret 2024 Rp 3.840.942.344,- sehingga persentase peningkatan yoy sebesar 10,65%

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	1841 Hasil Layanan	24,54%	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1-3: Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 1612 LHU b) Kalibrasi = 92 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 53 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 54 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 1 j) LPH = 13 k) PUP = 0 l) PBA = 0 m) lainnya = 0
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50%	3,31 %	22,83%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU	B1-3: 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	56,22%	103,69%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B1-3: 1] melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari-Maret 2025. 2] melakukan pengesahan penerimaan BLU periode Januari-Maret 2025
4	Terwujudnya SDM yang profesional	. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	78,40	95,94	25%	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/ webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	B1.menyusun dan menyesuaikan rencana peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan efisiensi anggaran , Terselenggaranya (InhouseTraining Tata Cara Perhitungan TKDN dan BMP - Narasumber Irmansyah Perwira Negara) B2. Pembaharuan data pelatihan dan Pendidikan SDM. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									Sertifikasi AK3 Umum, AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas) B3.Memonitoring usulan rencana pelatihan dan ketersediaan anggaran 2025. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO)
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	18%	90%	25%	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJ	B1-3: 1] Menentukan jenis layanan yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI 2] Melakukan monitoring data yang perlu diintegrasikan
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	Penilaian di akhir tahun	-	25%	25%	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.	B1-3 :analisis kebutuhan system informasi untuk penyerapan SLE

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.62 indeks	Penilaian self mandiri di akhir tahun	-	30%	30%	1] Mengevaluasi/mereview nilai IPP Tahun sebelumnya. 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDii. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin	B1-3:1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPP dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/informasi kepada pelanggan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	50 %	100%	15%	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1-B3 Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 27/BBSPJPPI/PR/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024, Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok Kerja, Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024 telah disampaikan oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja secara lengkap.
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	25%	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan	B1-B3 . 1] Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 275 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 1200 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								pengisian form pengawasan internal.	Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 31 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 446 4] Penyusutan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 221 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 200
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	83,60	101,95	30%	40%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itje	B1-B3: 1] Rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJI 2025 dengan Biro Perencanaan pada 4 Februari 2025 2] Penyampaian dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBSPJPPI sesuai hasil rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJI 2025 3] Penyusunan dokumen rencana aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									4] Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2024 pada satker BBSPJPPI 5] Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 12 Maret 2025 secara online dengan Tim Evaluator Inspektorat III 6] Penyusunan draft laporan PP 39 triwulan I 2025
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA	94 nilai	100 nilai	111%	25%	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontra	B1-B3:1] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw I 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 21 Februari 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								k dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53 %	-(akun terpilih anggaranya diblokir)	-	30%	20%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam	B1-B3: 1] Pengajuan usulan Data Pengadaan Produk Melalui Impor BBSPJPPI TA 2025 melalui Nota Dinas No. 18/BBSPJPPI/PBJ/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 guna mendapatkan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%. 2] Pelaksanaan kontrak audit KAP. 3]Melakukan pengadaan Portable Gas Calibrator dan Portable High Performance Zero Air System melalui

No.	Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	eKatalog, dimana alat tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam proses pengadaan.

A. Tujuan Kegiatan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Tabel 10. Pengukuran Realisasi Tujuan Kegiatan Triwulan I TA 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3.74 indeks	101.63	25%	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan	B.1-3 : 1] Penyebaran kuesioner bulan Januari-

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	Maret 2025 yang kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 37 responden 2] Hasil analisa IKM bulan Januari – Maret berpedoman pada Permen PANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,74 indeks
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	299 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	31.15 %	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan	B1-3 Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 182 b) Kalibrasi = 12 c) Bimbingan dan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	Pendampingan Teknis = 5 d) Sertifikasi = 67 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 0 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 9 j) LPH = 10 k) PUP = 11 l) PBA = 0 m) lainnya = 0

Tujuan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Tujuan, meliputi :

1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara

menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM menggunakan skala indeks 1-4 dengan kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, BBSPJPPI setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan BBSPJPPI telah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Responden dari survei ini adalah pengguna layanan BBSPJPPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan jasa di BBSPJPPI dan dipilih secara acak.

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I
- 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I
- 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

Telah dilakukan pelayanan jasa teknis kepada pelanggan selama periode Januari dan Maret 2025 dimana dalam rangka pemantauan kualitas layanan telah dilakukan penyebaran kuesioner yang kembali di Bulan Januari-Maret sebanyak 37 kuesioner

yang masuk dimana setelah dievaluasi didapat nilai IKM sebesar 3,74. Selama periode Januari sd Maret tidak didapati adanya keluhan pelanggan.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan I telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Jumlah pengembalian kuesioner survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan I jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDI yang belum mengakomodir keharusan mengisi IKM sebelum mengunduh LHU. Dimana perusahaan bisa menunduh LHU mandiri tanpa keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan oleh pelanggan.

c Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah nilai indeks IKM berdasarkan perhitungan jumlah kuesioner yang diterima sd Triwulan I masih memenuhi target, namun jumlah sampel kuesioner yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sd Triwulan I 2025 sebagaimana ketentuan dalam PerMenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, disamping upaya untuk selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM sesuai target perlu untuk meningkatkan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang telah diisi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- Pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU

2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 25%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Maret 2025 adalah jumlah perusahaan industri pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri dari periode bulan Januari sampai Maret sebanyak 299 perusahaan industri berdasarkan data rincian sebagai berikut :

- a) Pengujian = 182
- b) Kalibrasi = 12
- c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 5
- d) Sertifikasi = 67
- e) Inspeksi Teknis = 0
- f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1
- g) Teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 0
- h) RBP (desain IPAL) = 1
- i) Verifikasi TKDN = 9
- j) LPH = 10
- k) PUP = 11
- l) PBA = 0
- m) lainnya = 0

b. Kendala

1. Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik Dinas LH maupun laboratorium kompetitor milik swasta.
2. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji Profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan.
3. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPI meski beragam promosi telah dilakukan

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan

Rencana perbaikan triwulan selanjutnya adalah :

- 1 Meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
- 2 Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
- 3 Melakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri sebagai ajang promosi layanan.

B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

Tabel 11 .Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88 Persen	88,14%	100,16 %	25%	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan	B1-3 1) SPK yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diterima

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
	I							2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi	sampai dengan bulan Januari 2025 = 31 dokumen
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40	70	175%	25%	25%	3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I	2) Perhitungan SPM jasa layanan BBSPJPI pada bulan Januari – Maret 2025: >Jumlah order 1813 > jumlah sampel sesuai SPM 1598 sehingga SLA 88,14%
								4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I
									2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I
									kepada 208 responden dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 37. 2] Hasil analisa NPS bulan Maret 2025 adalah sebesar 50 dengan rata-rata nilai sampai dengan bulan Maret 2025 adalah sebesar 70

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*.

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$$\left(\frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \right) \times 100\%$$

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja “ Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)” Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1) SPK yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diterima sampai dengan bulan Januari 2025 = 31 dokumen

2) Perhitungan SPM jasa layanan BBSPJPI pada bulan Januari – Maret 2025:

Jumlah order : 1813

jumlah sampel sesuai SPM : 1598 sehingga perhitungan SLA sebesar 88,14%

b. Kendala.

Belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan sd Triwulan I 2025 secara umum masih memenuhi target, namun masih perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan khususnya pada layanan pengujian mengingat capaian pada medio Februari masih dibawah target.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

>**Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

>**Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

>**Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*).

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja “ Nilai Net Promoter Score (NPS)” Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan
 - 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I
- Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah
- 1] Penyebaran kuesioner kepada 208 responden dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 37 responden
 - 2] Hasil analisa NPS Triwulan I tercapai adalah sebesar 70.

b. Kendala

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih sedikit dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan menunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah nilai NPS berdasarkan jumlah kuesioner yang diterima sd Triwulan I masih memenuhi target, namun jumlah sampel kuesioner yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sd Triwulan I 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun isian kuesioner yang kembali ke BBSPJPI seperti: menysar pelanggan yang datang ke BBSPJPI untuk langsung mengisi form kuesioner.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- Pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU .

C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Tabel 12. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan I TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71%	10,65 %	38,43%	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1-3 ➤ :Pemberian layanan pelanggan sesuai permintaan yang disepakati. ➤ Capaian penerimaan Jan-Maret 2025 (data OMSPAN) sebesar Rp 4.249.926.588 dibandingkan penerimaan Jan-Maret 2024 Rp 3.840.942.344,-
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	1841 Hasil Layanan	24,55%	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke	B1-3: Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 1612 LHU b) Kalibrasi = 92 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 53 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 54 sertifikat/ hasil

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 1 j) LPH = 13 k) PUP = 0 l) PBA = 0 m) lainnya = 0
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50%	3,31 %	22,83%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	B1-3: 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja
		4. Rasio	54.22 %	56,22%	103,69	25%	25%	1]	B1-3:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
		Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)			%			Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/penge-luaran operasional	1] melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari-Maret 2025. 2] melakukan pengesahan penerimaan BLU periode Januari-Maret 2025

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1. Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP

a. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
2. Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
3. Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
4. Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
5. Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
2. Membuat kontrak penawaran
3. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Triwulan I
4. Penerimaan Januari – Maret 2025 sebesar Rp 4.249.926.588,- (22,74%) dari target Rp. 18.686.000.000,-

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian masih terbatas.
4. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas.
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup

jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBP dari seluruh layanan jasa BBSPJPPI (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan pengujian), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan serta perlunya segera dilakukan peninjauan tarif BLU BBSPJPPI untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi untuk lingkup layanan baru BBSPJPPI (uji RATA, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal) dengan memanfaatkan media sosial balai maupun melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pameran.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong proses akreditasi untuk jasa layanan yang telah diinisiasi sebelumnya (uji profisiensi) serta mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerima PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
4. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

2. Indikator Kinerja Sasaran 2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.
2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap

peningkatan PNBP (berbayar)

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan).

Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi/ Kajian)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja " Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
2. Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
3. Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
4. Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
5. Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2025:

- a) Pengujian = 1612 LHU

- b) Kalibrasi = 92 LHU
- c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 53 sertifikat/ laporan
- d) Sertifikasi = 54 sertifikat/ hasil surveilen
- e) Inspeksi Teknis = 0 laporan
- f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 laporan
- g) Teknologi proses dan mesin (peralatan AiMS) = 1
- h) RBP (desain IPAL) = 1
- i) Verifikasi TKDN = 1
- j) LPH = 13
- k) PUP = 0
- l) PBA = 0

b. Kendala.

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari triwulan ini adalah

1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
3. Memperkuat kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
4. Memperkuat jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi
5. Memperkuat hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI
6. Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia.

3. Indikator Kinerja Sasaran 2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Nilai Revenue on Asset (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Nilai Revenue on Asset (RoA) pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja

b. Kendala.

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan PNBP.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya diantaranya dengan melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku aset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu. Disamping itu, untuk mendorong optimalisasi aset pada BLU BBSPJPI dapat dijangki pembentukan unit usaha BLU.

4. Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$$\text{POBO} = (\text{Pendapatan Operasional} / \text{Biaya Operasional}) \times 100\%$$

Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada Triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari- Maret 2025.
2. Melakukan pengesahan penerimaan BLU periode Januari- Maret 2025

b. Kendala.

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan monitoring penerimaan dilakukan setiap hari dan pengesahan penerimaan dilakukan sebulan sekali.

D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 13. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan I TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30 Indeks	78,40	96,43	25	25	1 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	B1.menyusun dan menyesuaikan rencana peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan efisiensi anggaran , Terselenggaranya (InhouseTraining Tata Cara Perhitungan TKDN dan BMP - Narasumber Irmansyah Perwira Negara) B2. Pembaharuan data pelatihan dan Pendidikan SDM. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum, AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas) B3.Memonitoring usulan rencana pelatihan dan ketersediaan anggaran 2025. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO)

Sasaran Kegiatan 3, mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural.
2. Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai.
3. Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala
4. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Monitoring Usulan Rencana Pelatihan dan Ketersediaan Anggaran 2025
2. Pembaruan Data Pelatihan dan Pendidikan Pegawai
3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan manajemen & pengelola keuangan terkait ketersediaan anggaran pelatihan Struktural dan Fungsional)
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi ((Inhouse Training Tata Cara Perhitungan TKDN dan BMP - Narasumber Irmansyah Perwira Negara-Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO)

Dari data diatas , maka indikator ini berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN.
- Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait.
- Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang.
- Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshot).

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2025 dan juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target perjakan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025.
- Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar.
- Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDMD.
- Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi.
- Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat.
- Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai

E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 4 Triwulan I TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20%	18 %	90%	25%	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	B01 -03 1] Menentukan jenis layanan yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI 2] Melakukan monitoring data yang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
									perlu diintegrasikan
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80%	Penilaian di akhir tahun	-	25%	25%	1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	B1-3 Melakukan improvement kebutuhan jaringan untuk penerapan SPBE
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	Penilaian self mandiri di akhir tahun	-	30%	30%	1) Mengevaluasi/mereview nilai IPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap	B1-3: 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin	

Sasaran Kegiatan 4, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Cara menghitungnya adalah Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi.

Adapun jenis layanan yang akan diintegrasikan meliputi pengujian, sertifikasi, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis, dan konsultasi.

Integrasi yang dimaksud di atas adalah menggunakan metode *Application Programming Interface (API)*.

Menjumlahkan jenis layanan di UPS BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI melalui API pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan yang akan diintegrasikan di UPT BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknsi, 2029 layanan konsultasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 20%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi

2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1] Menentukan jenis layanan yang akan diintegrasikan pada tahap awal dengan sistem informasi BSKJI

2] Melakukan monitoring data yang perlu diintegrasikan dan pengambilan data setiap bulannya.

3] Pengembangan dan penyempurnaan dashboard data kinerja pada sistim SINDii BBSPJPI

b. Kendala

1] Akses data baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret menjelang libur panjang

2] Terdapat perbedaan data yang dilaporkan pada tahun 2024

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesiapan pelaksanaan integrasi sistem informasi memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak penanggung jawab sistem informasi dari pihak Sekretariat BSKJI.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan bagian pengembang sistem informasi pada Sekretariat BSKJI untuk kesiapan dan kebutuhan pelaksanaan integrasi sistem informasi.

2. Indikator Kinerja Sasaran 4.2 : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (16 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (14 sub indikator). Dari setiap

sub indikator yang berjumlah total 38 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lembar Kerja yang disediakan oleh Pusdatin.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 20%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- 1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.
- 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan.
- 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Melakukan improvement kebutuhan jaringan untuk penerapan SPBE

b. Kendala

Dalam perhitungan simulasi LKE Tingkat Penerapan SPBE masih memerlukan bimbingan Pusdatin.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring kebutuhan jaringan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah monitoring kebutuhan dan permintaan untuk jaringan agar sesuai yang diharapkan. Lalu berkonsultasi dengan Pusdatin terkait pengisian LKE Tingkat Penerapan SPBE.

3 Indikator Kinerja Sasaran 4.3 : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

1. Mengevaluasi/mereviu nilai IPP Tahun sebelumnya.
2. Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDi.
3. Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.
4. Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan.
5. Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.
6. Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
- Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pelaksanaan self asesmen capaian indeks pelayanan publik masih memenuhi kriteria pelayanan prima, namun masih perlu untuk ditingkatkan khususnya untuk aspek yang nilainya dipandang masih kurang diantaranya terkait aspek sarana prasarana dan sistem informasi pelayanan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Pengembangan kapabilitas kompetensi SDM di bidang IT.
- Pengembangan sistem informasi yang *user friendly* bagi pelanggan dalam mengakses jasa layanan balai.
- Lebih proaktif berkomunikasi dengan pelanggan untuk penerima kritik dan saran secara langsung melalui supervisi lapangan.

- Update/pengembangan sistem informasi secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk upaya modernisasi BLU.
- Dilakukan update / input dokumen (jika ada dokumen baru).
- Pengembangan website yang lebih informatif dan mudah diakses.
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung IT.
- Perkuat Sistem layanan satu pintu.

F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 15. Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis 5 Triwulan I TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 %	50%	100%	15%	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1-B3 Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 27/BBSPJPPI/PR/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024, Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok Kerja, Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024 telah disampaikan oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja secara lengkap
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91.84	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	25%	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	B1-B3 .1] Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 275 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 1200 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 31 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 446

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
									4] Penyusutan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 221 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 200

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA 2025 target fisik dari indikator ini 15 % dengan realisasi 15 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I adalah:

- 1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya
- 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- 1] Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 27/BBSPJPPI/PR/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024
- Masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan BBSPJPPI Tahun 2024.
- Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2024 telah disampaikan oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja secara lengkap.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan telah disampaikan oleh seluruh penanggung jawab kegiatan meskipun masih terdapat laporan yang disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, untuk jadwal pelaksanaan audit kinerja tahun 2024 pada satker BBSPJPPI masih menunggu kepastian jadwal dari pihak Inspektorat III.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban keuangan dan dokumen kelengkapan pengadaan barang jasa kegiatan tahun 2024 dalam rangka persiapan pelaksanaan audit kinerja dengan berkoordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Keuangan dan Kelompok Kerja Umum BBSPJPPI.

Untuk memastikan masing-masing penanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu, Tim Pokja Program Pelaporan akan melakukan monitoring progres penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala sebelum batas akhir waktu penyampaian.

2. Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh unit kearsipan dalam memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek tata kelola arsip, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas sistem kearsipan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi administrasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan arsip agar tetap tertib, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi capaian sebesar 25 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I.
- 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- 1] Pengendalian Naskah Dinas:
 - Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 275
 - Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 1200
- 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 31
- 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 446
- 4] Penyusutan Arsip:
 - Pembuatan Daftar Usul Pindah = 221
 - Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 200

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.
- 2] Tidak semua SDM yang terkait kearsipan memahami aplikasi srikandi khususnya untuk surat keluar.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan

pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis
BBSPJPPI

G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 16. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan I TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	83,60	101.95	30%	40%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itje	B1-B3: 1] Rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJI 2025 dengan Biro Perencanaan pada 4 Februari 2025 2] Penyampaian dokumen penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBSPJPPI sesuai hasil rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJI 2025 3] Penyusunan dokumen rencana aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 4] Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2024 pada satker BBSPJPPI 5] Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 12 Maret 2025 secara online dengan Tim Evaluator Inspektorat III 6] Penyusunan draft laporan PP 39 triwulan I 2025
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94 nilai	100 nilai	111%	25%	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan	Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw I 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 21 Februari 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2025, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2024 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pelaksanaan rencana kegiatan yang mendukung pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja satker BBSPJPPI selama periode Triwulan I 2025 diantaranya melalui penyiapan dokumen pengukuran kinerja tahun berjalan, penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk mendukung proses penganggaran periode tahun berikutnya, proses pelaporan kinerja Triwulan I serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja periode tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 30 % dengan realisasi capaian sebesar 30 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Penyusunan dokumen Tapkin 2025
- 2] Penyusunan dokumen Renkin 2026
- 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)
- 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021
- 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian dokumen penyesuaian Tapkin/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBSPJPPI sesuai hasil rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJI 2025
- Telah dilakukan penyusunan dokumen Renkin BBSPJPPI Tahun 2026.
- Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2024 pada satker BBSPJPPI. Dokumen telah diupload pada link yang disediakan Sekretariat BSKJI .
- Evaluasi Implementasi Penilaian SAKIP 2024 pada satker BBSPJPPI pada tanggal 12 Maret 2025 melalui media aplikasi zoom workplace sesuai jadwal
- Penyusunan Laporan PP 39 Tw I tahun 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Dokumentasi pelaksanaan monev kinerja belum terdokumentasi dengan baik

Belum terdapat kriteria/prosedur dalam pemberian punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI telah dilakukan secara tepat waktu. Namun demikian terkait dengan kesiapan dalam rangka penilaian implementasi SAKIP masih didapati kendala menyangkut kelengkapan dokumen pelaksanaan monev kinerja serta dokumen pengukuran kinerja.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan pengarsipan atas bukti pelaksanaan monev kinerja pada tahun berjalan sehingga memudahkan untuk proses penilaian SAKIP kedepannya. Terkait dengan pengukuran kinerja akan dilakukan review terkait SOP pengukuran kinerja khususnya menyangkut pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian punishment.

Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP 2024, selanjutnya sesuai hasil LHE SAKIP satker BBSPJPPI tahun 2024 akan disusun rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Tim evaluator Inspektorat Jenderal.

2. Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi capaian sebesar 30 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
- 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
- 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I
- 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu
- 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Telah dilakukan pengajuan usulan revisi Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw I 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 21 Februari 2025

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Perbendaharaan Nomor S-50/Pb.2/2025, dengan mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga serta adanya pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025, maka untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 diberikan nilai 100.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran RPD hal III DIPA pada Triwulan I 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya diantaranya:

- Melakukan penyusunan dan penyesuaian rencana penarikan anggaran pada Triwulan II 2025 secara akurat dan selanjutnya melakukan revisi pemutakhiran hal III DIPA sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
- Melakukan pelaporan capaian output pada Aplikasi SAKTI secara berkala sesuai batas waktu yang ditentukan
- Penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN secara tepat waktu.

H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan I TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/dam/atau jasa pemerintah	53%	- (posisi akun terpilih anggarannya diblokir)	-	30%	20%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-	B1-B3: 1] Pengajuan usulan Data Pengadaan Produk Melalui Impor BBSPJPPI TA 2025 melalui Nota Dinas No. 18/BBSPJPPI/PBJ/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 guna mendapatkan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%. 2] Pelaksanaan kontrak audit KAP. 3]Melakukan pengadaan Portable Gas Calibrator dan Portable High Performance Zero Air System melalui eKatalog, dimana alat tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam proses pengadaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5j Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6j Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging P3DN dalam aplikasi e-Mon APBN	

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama meliputi akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dan /atau akun BLU 525121,525154,525153, 537112, dan 537113.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Guna mendukung hal tersebut, telah disusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBSPJPPI tahun 2024.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan
- 2] Pengisian aplikasi P3DN
- 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%
- 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- 5] Melakukan tagging realisasi TKDN/PDN atas realisasi belanja pengadaan barang/jasa pada aplikasi SAKTI
- 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi intranet

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan I yaitu:

1. Pengajuan usulan Data Pengadaan Produk Melalui Impor BBSPJPPI TA 2025 melalui Nota Dinas No. 18/BBSPJPPI/PBJ/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 guna mendapatkan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%.
2. Pelaksanaan kontrak untuk audit laporan keuangan BLU dengan Kantor Akuntan Publik dalam negeri.
3. Melakukan pengadaan Portable Gas Calibrator dan Portable High Performance Zero Air System melalui eKatalog

4. Telah dilakukan pencatatan/tagging pada aplikasi SAKTI atas realisasi belanja TKDN/PDN untuk pengadaan barang/jasa selama periode Januari sd Maret 2025

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPI periode Januari-Maret berdasarkan data tagging realisasi TKDN pada aplikasi intranet diperoleh data capaian sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan akun terpilih dalam perhitungan TKDN terkena blokir untuk efisiensi anggaran.

Tabel 18 : Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada akun 521211 ; 521219; 521811; 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191; 521241; 521841; 532111; 533111.

Pagu anggaran	Blokir	Efektif	Import	% Realisasi PDN & TKDN
1.373.665.000	1.373.665.000	0	0	0

Sumber: Intranet Kemenperin

Dari data di atas, maka indikator kinerja belum berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

1. Kebijakan dari pusat untuk melakukan efisiensi, sehingga menunda seluruh kegiatan belanja termasuk alokasi untuk belanja pengadaan barang/jasa.
2. Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.
3. Akun terpilih terkait TKDN saat ini masih diblokir untuk pemenuhan alokasi terkait efisiensi anggaran.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pencapaian target realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan monitoring atas tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Apabila terdapat potensi dilakukan pembukaan blokir anggaran, maka segera ditindak lanjuti dengan

melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengutamakan belanja yang memenuhi standar persentase TKDN.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025 sampai dengan Triwulan I 2025, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Kegiatan pada Triwulan I TA. 2025 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan sebesar 25,56 % sedangkan target capaian realisasi keuangan sebesar 22,34 %. Untuk capaian fisik yang ditetapkan BSKJI sebesar 25 %. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan inspeksi teknis, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi serta fasilitasi dan pembinaan industri.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan inspeksi teknis), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19. Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TV RO	RVR O	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RVR O	Progres	RVR O	Progres	RVR O	Progres
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri)	283.410.000	0	0	150 orang	0	0	0	0	0	0	0
BAD Pelayanan publik kepada industri Prasarana Internal	002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	5.185.776.000	28,35	480 industri	15 industri	24,99%	88	8,33	41	8,33	26	8,33
	022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	475.736.000	0	30 industri	9 industri	24,99%	3	8,33	3	8,33	3	8,33
	034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000	12,82	240 industri	77 industri	24,99%	35	8,33	29	8,33	13	8,33
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000	1,38	5 industri	3 industri	24,99%	1	8,33	1	8,33	1	8,33
	056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000	70,50	10 industri	9 industri	75%	2	8,33	4	8,33	3	58,34
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	462.382.000	3,28	8 industri	3 industri	24,99%	1	8,33	1	8,33	1	8,33

	Pencegahan Pencemaran Industri											
	096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	155.66 8.000	0	15in dus t	1 indus t	24, 99 %	0	8.3 3	1	8.3 3	0	8.3 3
CAH Saran a Bidan g Indust ri dan Perda ngan g	013 - Peralatan fasilitas laboratorium/w orkshop/layana n Pencegahan Pencemaran Industri	1.585. 370.00 0	0	38 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	Target Keuangan BSKJI 22,34%	Rp 9.334. 260.00 0	17.4 5%									

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri memiliki 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan I, total realisasi keuangan belum terealisasi. Demikian pula dengan total realisasi fisik belum mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

- Pembuatan draft desain pemutakhiran company profile, brosur-brosur layanan.
- Pembuatan jadwal konten media sosial
- Pencetakan bahan-bahan promosi (company profile, brosur,dll) untuk bahan promosi dan pameran; pengunggahan e-book di media elektronik dan media online; pengunggahan konten media sosial secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Rekap pelanggan calon peserta BG.

2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri

Sampai Triwulan I, total realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian

pula dengan total realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama pemantauan lingkungan.
- Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel untuk pengujian air limbah, udara emisi, dan produk (dalam rangka penerbitan SPPT SNI).
- Pelaksanaan pengujian subkon untuk parameter pengujian yang belum dapat dilakukan di laboratorium BBSPJPPI
- Pengadaan bahan kimia, bahan penolong, sparepart untuk mendukung operasional layanan pengujian.
- Pelaksanaan audit sertifikasi dalam rangka penerbitan SPPT SNI, sertifikat industri hijau dan sertifikat sistem mutu, pelaksanaan layanan kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis SDM industri, serta supervisi dalam rangka pelaksanaan kerjasama optimalisasi pemanfaatan teknologi.

3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan I, realisasi keuangan masih belum terrealisasi. Demikian pula dengan total realisasi fisik belum mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

- Rapat persiapan pengadaan peralatan dan kelengkapan laboratorium BBSPJPPI, serta menyusun list peralatan yang berasal dari impor.
- Koordinasi usulan kebutuhan update pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium.

b) Kendala

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi

- Pelaksanaan kegiatan Business Gathering sesuai perencanaan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan III 2025
- Belum tersedia jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPPI

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi

kegiatan yang sudah dijalankan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Pencarian informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran dengan tema dan target pasar yang sesuai dengan lingkup layanan BBSPJPPI. Persiapan partisipasi pada kegiatan pameran yang akan diikuti.
- Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penunjukan panitia pelaksana, penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pengelolaan majalah /jurnal ilmiah/buku , pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Maret	TVR O	RVR O	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	103.528.000	0	1 layanan	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	962 - Layanan Umum	73.958.000	0	1 layanan	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	994 - Layanan Perkantoran	19.246.819.00	28.8	1 layanan	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	201.735.000	0	90 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
	971 - Layanan Prasarana Internal	0	0	1 unit	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	53.188.000	0	107 orang	27 orang	24.99	9	8.33	9	8.33	9	8.33
	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	353.330.000	0	55 orang	43 orang	16	41	8	0	0	2	8
	952 - Layanan Perencana	45.906.000	0	2 dokumen	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33

EBD	naan dan Pengan ggaran											
Layan an Manaj emen Kinerja	953 - Layanan Pemant auan dan Evaluasi	44.061.000	0	2 doku men	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
Intern al Indust ri	955 - Layanan Manaje men Keuang an	106.892.000	0	2 doku men	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	961 - Layanan Reform asi Kinerja	6.115.000	0	2 doku men	0	24.99	0	8.33	0	8.33	0	8.33
Total	Target Keuang an 22,34%	20.235.532.000	27,4 %									

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian pula dengan total realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pembayaran biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras perkantoran (gedung dan bangunan kantor, kendaraan operasional, alat laboratorium), pengadaan bahan makanan penambah daya tahan tubuh, penyelenggaraan poliklinik, pengelolaan jaringan data, Mapping Kebutuhan Sistem Informasi yg diperlukan tiap Bagian
- Finalisasi Kebutuhan Sistem Informasi dan Perbaikan sistem yang sudah berjalan.

2. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan belum terealisasi. Demikian pula dengan total realisasi fisik belum mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Merencanakan pengadaan perangkat inventaris perkantoran berupa peralatan dan mesin ekstrakomtabel BLU.

3. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan belum terealisasi karena menggunakan kegiatan menggunakan daring . Sementara untuk total realisasi fisik mencapai sasaran yang ditetapkan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Koordinasi administrasi kepegawaian.
- Menyusun Rencana Pelatihan Teknis 2025 dan Koordinasi dengan PIC penyelenggaraan Diklat
- Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO).

4. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan belum terealisasi karena menggunakan kegiatan menggunakan daring. Demikian pula dengan total realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) satker BBSPJPPI Tahun 2025.
- Telah dilakukan penyusunan dokumen KAK dan RAB sesuai besaran pagu usulan satker BBSPJPPI untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran tahun 2025.
- Telah dilakukan penyusunan dan penyampaian dokumen Perjanjian Kinerja satker BBSPJPPI TA 2025. Dokumen Perkin 2025 telah disetujui dan ditandatangani.
- Mengikuti pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP satker BSKJI tahun 2025.
- Penyampaian dokumen kontrak kinerja BLU tahun 2025 sesuai hasil

rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama Aspek Layanan pada Badan Layanan Umum Lingkup Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dengan pihak Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan.

- Pengumpulan data kinerja sd Triwulan I 2025 dan penyusunan draft laporan PP 39 Tw I 2025 satker BBSPJPI.

b. Kendala

1. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- Terdapat penyesuaian efisiensi terhadap kebutuhan pengadaan Kendaraan Operasional, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta sebagian Peralatan Inventaris Perkantoran, termasuk pemblokiran anggaran untuk kegiatan Pembangunan/Renovasi (Peningkatan Kapasitas) Bangunan Gedung BBSPJPI.

c. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antarunit maupun peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak. Sebagai langkah antisipatif, dilakukan pula pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan tidak termasuk dalam daftar pemblokiran, dengan memanfaatkan data pada portal P4DN. Pengadaan belanja modal tetap dapat dilanjutkan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, guna memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan dan mendukung kelangsungan operasional prioritas BBSPJPI.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Net Promoter Score (NPS) terdapat kendala dalam pengembalian kuesioner yang disebar jumlahnya sedikit dibanding kuesioner yang disebar.
- b. Terkait dengan indikator kinerja Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan indikator Jumlah hasil layanan jasa industri terdapat kendala yaitu adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik Dinas LH maupun laboratorium kompetitor milik swasta, telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan, masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan
- c. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.
- d. Terkait dengan sasaran kegiatan Terwujudnya SDM yang profesional dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala yaitu belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN, belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait, Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang, Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshot)
- e. Terkait dengan sasaran kegiatan Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI terdapat kendala yaitu akses data

- baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret menjelang libur Panjang, terdapat perbedaan data yang dilaporkan pada tahun 2024.
- f. Terkait dengan indikator kinerja tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala dalam perhitungan simulasi LKE Tingkat Penerapan SPBE masih memerlukan bimbingan Pusdatin.
 - g. Terkait dengan sasaran kegiatan Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat., tidak semua SDM yang terkait kearsipan memahami aplikasi srikandi khususnya untuk surat keluar.
 - h. Terkait dengan sasaran kegiatan Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri dengan indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah terdapat kendala yaitu Kebijakan dari pusat untuk melakukan efisiensi, sehingga menunda seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa, Pengajuan usulan pengadaan melalui impor diminta untuk menunda., dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN dan akun terpilih terkait TKDN saat ini masih diblokir untuk pemenuhan alokasi terkait efisiensi anggaran.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 belum ada aplikasi ALKI dan PP39 yang dapat menunjukkan target keuangan dan fisik per KRO, sehingga tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi keuangan maupun fisiknya. Data yang digunakan adalah dari Aplikasi SMART DJA .

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat kendala:

- Pelaksanaan kegiatan Business Gathering sesuai perencanaan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan III 2025
- Belum tersedia jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPI

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 belum ada aplikasi ALKI dan PP39 yang dapat menunjukkan target keuangan dan fisik per KRO, sehingga tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi keuangan maupun fisiknya. Data yang digunakan adalah dari Aplikasi SMART DJA .

Terkait KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdapat kendala:

- Terdapat penyesuaian efisiensi terhadap kebutuhan pengadaan Kendaraan Operasional, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta sebagian Peralatan Inventaris Perkantoran, termasuk pemblokiran anggaran untuk kegiatan Pembangunan/Renovasi (Peningkatan Kapasitas) Bangunan Gedung BBSJPPI.

3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja triwulan 1 TA 2025 yang utama selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Net Promoter Score (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran serta pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Untuk meningkatkan indikator kinerja jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri,persentase peningkatan PNBSP dan jumlah hasil layanan jasa industri dengan meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi, meningkatkan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi dengan harga yang bersaing serta melakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri.
3. Terkait persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement dengan cara memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping

itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

4. Terkait indikator kinerja IP ASN perlu mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi serta mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.
5. Terkait indikator kinerja Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI perlu dilakukan koordinasi dengan bagian pengembang sistem informasi pada Sekretariat BSKJI untuk kesiapan dan kebutuhan pelaksanaan integrasi sistem informasi.
6. Terkait indikator kinerja tingkat penerapan SPBE perlu dilakukan berkonsultasi dengan Pusdatin terkait pengisian LKE Tingkat Penerapan SPBE.
7. Terkait nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
8. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan monitoring atas tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Apabila terdapat potensi dilakukan pembukaan blokir anggaran, maka segera ditindak lanjuti dengan melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengutamakan belanja yang memenuhi standar persentase TKDN.

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Pencarian informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran dengan tema dan target pasar yang sesuai dengan lingkup layanan BBSPJPPI. Persiapan

partisipasi pada kegiatan pameran yang akan diikuti.

- Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penunjukan panitia pelaksana, penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antarunit maupun peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak. Sebagai langkah antisipatif, dilakukan pula pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan tidak termasuk dalam daftar pemblokiran, dengan memanfaatkan data pada portal P4DN. Pengadaan belanja modal tetap dapat dilanjutkan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, guna memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan dan mendukung kelangsungan operasional prioritas BBSPJPI.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, beberapa capaian perjanjian kinerja telah berhasil memenuhi target. Di antaranya adalah indikator kinerja "*Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*", dengan target 50 persen dan telah terealisasi sebesar 50 persen. Capaian ini diperoleh karena rekomendasi hasil audit internal, baik dari tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya (2015–2023), telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Sesuai Rekomendasi/SR). Selanjutnya, indikator kinerja "*Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker*" juga menunjukkan hasil positif dengan capaian nilai 83,60, melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00. Sementara itu, beberapa indikator kinerja lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target karena sebagian kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan dan akan terus dimonitor pada triwulan berikutnya.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, selama Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan 4 (empat) kali revisi DIPA BBSPJPPI. Berdasarkan hasil revisi terakhir, total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 36.159.131.000,-, yang terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 17.473.131.000,- dan anggaran PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Namun, seiring dengan penetapan efisiensi melalui Nota Dinas BSKJI, telah dilakukan blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi sebesar Rp. 6.589.339.000,-, yang terdiri dari efisiensi Rupiah Murni sebesar Rp. 1.917.839.000,- dan PNBP/BLU sebesar Rp. 4.671.500.000,-. Dengan demikian, pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 29.569.792.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp. 4.249.926.588,- atau sebesar 22,74% dari total target penerimaan PNBPs tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Sementara itu, dari aspek kinerja penyerapan anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPI selama Januari-Maret mencapai Rp. 7.559.361.082,- atau sebesar 25,56% dari total pagu anggaran efektif berdasarkan DIPA hasil revisi terakhir. Realisasi ini terdiri dari penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 5.538.993.490,- (35,61%) dan PNBPs tahun berjalan sebesar Rp. 2.020.367.592,- (14,42%). Capaian tersebut melampaui target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu sebesar 22,34%.

Adapun capaian fisik kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai 25%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BSKJI yang sebesar 25%.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah terbatasnya waktu efektif untuk merealisasikan anggaran, yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor S/1/SJ-IND/PR/I/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk perjalanan dinas, diminta untuk ditunda mulai tanggal 25 Januari 2025.

Penelaahan bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, dan DIPA Revisi ke-3 yang memuat hasil recomposisi anggaran efisiensi baru diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2025. Kondisi ini menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan realisasi anggaran menjadi sangat terbatas, yakni hanya sekitar 19 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Maret hingga 27 Maret 2025. Meskipun demikian, BBSPJPI tetap berupaya optimal untuk menjalankan kegiatan prioritas dan mencapai target kinerja, sehingga realisasi anggaran Triwulan I mampu melampaui target yang ditetapkan.

Selain kendala terkait waktu pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran, hambatan juga dihadapi dalam pengukuran beberapa indikator kinerja. Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Net Promoter Score (NPS), pelaksanaan survei mengalami kendala pada aspek pengumpulan data. Sulitnya memperoleh responden yang bersedia mengisi survei secara sukarela berdampak pada keterbatasan data yang dibutuhkan untuk mengukur capaian indikator tersebut secara representatif. Di sisi lain, pengukuran indikator kinerja Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah belum dapat dilakukan secara akurat karena akun belanja yang menjadi dasar perhitungan mengalami efisiensi atau pemblokiran. Akibatnya, tidak terdapat pagu (nol) yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang memenuhi kriteria penggunaan produk dalam negeri, sehingga indikator ini tidak terukur pada Triwulan I Tahun 2025.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan hambatan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, BBSPJPPI perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja dan serapan anggaran pada triwulan berikutnya. Salah satu langkah utama adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi, serta memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah memiliki perikatan kontrak sebelum 30 Juni 2025 sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan dan anggaran juga harus dilakukan secara berkala agar apabila terdapat sisa kegiatan atau anggaran, dapat segera dilakukan revisi guna mengoptimalkan pemanfaatannya. Selain itu, perlu diupayakan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, termasuk penyusunan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Di sisi lain, untuk memperbaiki capaian indikator kinerja layanan, khususnya pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Net Promoter Score (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan menysasar pelanggan yang hadir secara langsung di BBSPJPPI untuk mengisi survei di tempat, serta melakukan pengiriman survei melalui WhatsApp dan email secara intensif dengan pendekatan komunikasi yang lebih efektif. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat TKDN dan tidak berada dalam akun yang diblokir, dengan memanfaatkan informasi dari portal P3DN. Pengadaan belanja modal juga perlu dipastikan hanya dilakukan terhadap item yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, agar pelaksanaan tetap sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2025

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	50%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga	75%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga	100%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga

							kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II		kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III		kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I.	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III.	100 %	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV.
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40	25%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian <i>Net Promoter Score</i> (NPS) TW I.	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian <i>Net Promoter Score</i> (NPS) TW II.	75%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian <i>Net Promoter Score</i> (NPS) TW III.	100 %	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian <i>Net Promoter Score</i> (NPS) TW IV.
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	100 %	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin

				pelanggan kepada BBSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.
2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	
3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	

		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100 %	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	100 %	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV.
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	50%	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1] Uji Coba Integrasi Sistem 2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100 %	1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3] Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4] Monitoring dan evaluasi

	2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	25%	<p>1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.</p> <p>2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan.</p> <p>3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi.</p>	50%	<p>1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang</p> <p>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas</p>	75%	<p>1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang</p> <p>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas</p>	100 %	<p>1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang</p> <p>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas</p>
	3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	30%	<p>1] Mengevaluasi/mereviu nilai IPP Tahun sebelumnya.</p> <p>2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDii.</p> <p>3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan</p> <p>5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.</p> <p>6] Penyebaran informasi</p>	50%	<p>1] Pengembangan/pemutakhiran SINDii.</p> <p>2] Update website secara berkala</p> <p>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS</p>	75%	<p>1] Pengembangan/pemutakhiran SINDii.</p> <p>2] Update website secara berkala</p> <p>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat</p> <p>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS</p>	100 %	<p>1] Update website secara berkala</p> <p>2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat</p> <p>3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat</p> <p>4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik</p> <p>5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan</p>

					kapasitas layanan melalui media Kemenperin.						
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100 %	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan.	75%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.	100 %	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian.

7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	50%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW II	75%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW III	100%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW IV.

8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/dam/atau jasa pemerintah	53 Persen	30%	<p>1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan</p> <p>2] Pengisian aplikasi P3DN</p> <p>3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%</p> <p>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	50%	<p>1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	75%	<p>1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>	100%	<p>1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN</p>
---	---	--	-----------	-----	--	-----	---	-----	---	------	---

Semarang, 31 Januari 2025

Kepala BBSPJPI



Sidik Herman

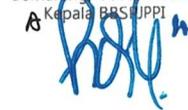
REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN I TA. 2025
SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian Tindak Lanjut	
						Fisik		Rencana	Kegiatan					Realisasi
						Target	Realisasi							
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66 indeks	3,74 indeks	101,63	25%	25%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (BP dan IPAK) TW I	B.1-3 : 1) Penyebaran kuesioner bulan Januari-Maret 2025 yang kembali kepada BBS/PPPI sejumlah 37 responden 2) Hasil analisa IKM bulan Januari – Maret berpedoman pada Perm PANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,73 indeks	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM	Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menghimpun isian kuesioner yang kembali ke BBS/PPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBS/PPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025	
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	299 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	31,15	25%	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBS/PPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBS/PPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW I	B1-3 Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBS/PPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 182 b) Kalibrasi = 12 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 5 d) Sertifikasi = 67 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 1 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 0 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 9 j) LPH = 10 k) PUP = 11 l) PBA = 0 m) lainnya = 0	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBS/PPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBS/PPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses blimtek kepada SDM terkait dan memuai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBS/PPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia		Desember 2025	
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	88,14%	100,16	25%	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan	B1-3 1) SPK yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diterimakan sampai dengan bulan Januari 2025 = 31 dokumen 2) Perhitungan SPM jasa layanan BBS/PPPI pada bulan Januari – Maret 2025: Jumlah order 1813 jumlah sampel sesuai SPM 1598 jadi SLA 88,14%	Belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.	monitoring penyelesaian pekerjaan khususnya pada layanan pengujian mengingat capaian pada bulan Februari masih dibawah target	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi/Sertifikasi, Inspektur dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho)	Desember 2025	
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	70	175	25%	25%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	B1-3 : 1) Penyebaran kuesioner kepada 208 responden dan kembali kepada BBS/PPPI sejumlah 8 responden 2) Hasil analisa NPS bulan Maret 2025 adalah sebesar 50 dengan rata rata nilai sampai dengan bulan Maret 2025 adalah sebesar 67,14	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey NPS	Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menghimpun isian kuesioner yang kembali ke BBS/PPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBS/PPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025	
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71	10,65 (penerimaan sesuai Orsman Maret 2025 dibandingkan Maret 2024)	38,43	25%	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBS/PPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBS/PPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I	B1-3. Capaian penerimaan Jan-Maret 2025 sebesar Rp 4.249.926.588 dibandingkan penerimaan Jan-Maret 2024 Rp 3.840.942.344.	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBS/PPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBS/PPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses blimtek kepada SDM terkait dan memuai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBS/PPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025	
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	1841 Hasil Layanan	24,55	25%	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBS/PPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBS/PPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I	B1-3 Jumlah hasil layanan BBS/PPPI sampai dengan bulan Maret 2025: a) Pengujian = 1612 LHU b) Kalibrasi = 92 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 53 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 54 sertifikat/ hasil survien e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) konsultasi (penyusunan pertek) = 1 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 1 j) LPH = 13 k) PUP = 0 l) PBA = 0 m) lainnya = 0	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBS/PPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBS/PPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses blimtek kepada SDM terkait dan memuai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBS/PPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025	
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	3,31%	22,83	25%	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 4) Monitoring Nilai Buku Aset Satuan Kerja	B1-3: 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja			Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbahul Anam)	Desember 2025	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
						Fisik		Kegiatan					
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi				
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	56,22%	103,69%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B1-3: 1] melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari- Maret 2025 2] melakukan pengesahan penerimaan BLU periode Januari- Maret 2025	belum bisa cetak laporan operasional SATKER TW I 2025 di SAKTI, sehingga penghungan belanja operasional dilakukan secara manual dengan data dari realisasi belanja di OM SPAN	mengambil data realisasi belanja dari OM SPAN sebagai dasar penghitungan belanja operasional	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Mibakhul Anam)	Desember 2025
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	78,40	96,43%	25%	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	B1.menyusun dan menyesuaikan rencana peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan efisiensi anggaran . Terselenggaranya (Inhouse Training Tata Cara Perhitungan TKDN dan BMP - Narasumber Irmsyah Perwira Negara) B2. Pembaharuan data pelatihan dan Pendidikan SDM. Fasilitas Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum, AK3 Bekeja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas) B3.Memonitoring usulan rencana pelatihan dan ketersediaan anggaran 2025. Fasilitas Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTel/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekeja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO)	1] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN 2] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait 3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang 4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak diterbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlambat mendokumentasikan kelengkapan (SI, Materi, Foto/Screenshot)	1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025 2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar 3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses BSKJ dan BPSDMD 4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTel/ Sosialisasi 5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat 6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Ketua Kelompok kerja Organisasi dan SDM (Agung B)	Desember 2025
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJ	20 Persen	18 Persen	90	25%	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJ	B1-3: 1] Menentukan jenis layanan yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJ 2] Melakukan monitoring data yang perlu diintegrasikan	1] Akses data baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret menjelang libur panjang 2] Terdapat perbedaan data yang dilaporkan pada tahun 2024	1] Melakukan analisa data sebelum proses integrasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	Penilaian di akhir tahun	-	25%	25%	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	B1-3 Melakukan improvement kebutuhan jaringan untuk penerapan SPBE	Dalam perhitungan simulasi LKE Tingkat Penerapan SPBE masih memerlukan bimbingan Pusdatin	berkonsultansi dengan Pusdatin terkait pengisian LKE Tingkat Penerapan SPBE		Desember 2025
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	penilaian self mandid di akhir tahun	-	25%	25%	1] Mengevaluasi/merevisi nilai IPP Tahun sebelumnya. 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDI. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Belai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemerperin	B1-3: 1] Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2] Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar	(-)	(-)		Desember 2025
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah diindaklanjuti oleh satker	50 Persen	50%	100%	15%	15%	1] Koordinasi penyusunan dan persiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B1-B3 Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPPPI Nomor 27/BBSPPPI/PR/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPPPI TA 2024, Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPPPI TA 2024 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok Kerja, Laporan Akhir Kegiatan BBSPPPI TA 2024 telah disampaikan oleh Tim Kerja/Kelompok Kerja secara lengkap.	(-)	(-)	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Desember 2025
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91.84	belum ada jadwal penilaian arsip	-	25%	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Sirkandi sepanjang TW I 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	B1-B3 :1] Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & registrasi Arsip Masuk = 275 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 1200 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 31 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 446 4] Penyusunan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 221 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Murnah = 200	1] Aplikasi SIRKANDI sering error sehingga input surat masuk di Sirkandi agak terlambat 2] Tidak semua SDM yang terkait kearsipan memahami aplikasi sirkandi khususnya untuk surat keluar.	1] Melaporkan ke Biro Umum sebagai UK 1. 2] Mengikutsertakan BIMTEK untuk SDM yang terkait kearsipan.	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	83,60	101,95	30%	40%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renlin 3] Pelaksanaan money kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyusunan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJ dan Tim Tijen	B1-B3: 1] Rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJ 2025 dengan Biro Perencanaan pada 4 Februari 2025 2] Penyampaian dokumen penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBSPPPI sesuai hasil rapat Pembahasan Indikator Tambahan Perkin UPT BSKJ 2025 3] Penyusunan dokumen rencana aksi Perjanjian Kinerja BBSPPPI Tahun 2025 4] Penyajian dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2024 pada satker BBSPPPI 5] Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPPPI telah dilaksanakan pada 12 Maret 2025 secara online dengan Tim Evaluator Inspektorat III 6] Penyusunan draft laporan PP 39 triwulan I 2025	Kendala pengumpulan data kinerja layanan pada sistem informasi karena adanya progres migrasi SINDI	1] Koordinasi permintaan data secara manual dengan Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri terkait realisasi kinerja layanan 2] Koordinasi dengan Sekretariat BSKJ dan Tim Evaluator terkait LHE Evaluasi SAKIP 2024 pada satker BBSPPPI	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Anyo W)	Desember 2025

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian Tindak Lanjut	
						Fisik		Rencana	Kegiatan					Realisasi
						Target	Realisasi							
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA)	94	100%	106,38%	25%	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakul yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	B1-B3:1] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw I 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 21 Februari 2025			Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Desember 2025	
B	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53 Persen	(posisi akun terpilih anggarannya diblokir)	-	30%	20%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang bertKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	B1-B3: 1] Pengajuan usulan Data Pengadaan Produk Melalui Impor BBSPP/PI TA 2025 melalui Nota Dinas No. 18/BBSPP/PI/PBJ/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 guna mendapatkan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%. 2] Pelaksanaan kontrak audit KAP. 3]Melakukan pengadaan Portable Gas Calibrator dan Portable High Performance Zero Air System melalui eKatalog, dimana alat tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam proses pengadaan	1] Kebijakan dari pusat untuk melakukan efisiensi, sehingga menunda seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa. 2] Pengajuan usulan pengadaan melalui impor diminta untuk menunda. 3] Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.	1] Melakukan penundaan dan pembatalan paket pengadaan di BBSPP/PI. 2] Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat TKDN dan tidak diblokir melalui website P3DN. 3] Melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sejgend.	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025	

Semarang, 14 April 2025

Kepala BBS/JPPI


Sidik Herman

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. +	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	013 Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri (orang)	150,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	002 Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	480,000	155,000	24,99	88,000	8,33	41,000	8,33	26,000	8,33
3	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	022 Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	30,000	9,000	24,99	3,000	8,33	3,000	8,33	3,000	8,33
4	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	034 Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	240,000	77,000	24,99	35,000	8,33	29,000	8,33	13,000	8,33
5	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	055 Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	5,000	3,000	24,99	1,000	8,33	1,000	8,33	1,000	8,33
6	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	056 Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	10,000	9,000	75,00	2,000	8,33	4,000	8,33	3,000	58,34
7	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	057 Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	8,000	3,000	24,99	1,000	8,33	1,000	8,33	1,000	8,33
8	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	096 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	15,000	1,000	24,99	0,000	8,33	1,000	8,33	0,000	8,33
9	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	CAN Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Unit)	013 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan Pencegahan Pencemaran Industri (Unit)	38,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
10	Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	65A Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	65B Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33

Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. +	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret		April	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
11	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58A Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	561 Layanan Umum (Layanan)	1,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000
12	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58A Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	564 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000
13	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58B Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	561 Layanan Sarana Internal (Unit)	90,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58B Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	561 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000
15	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58C Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	564 Layanan Manajemen SDM (Orang)	107,0000	27,0000	24,99	9,0000	8,33	9,0000	8,33	9,0000	8,33	0,0000
16	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58C Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	564 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55,0000	43,0000	16,00	41,0000	8,00	0,0000	0,00	2,0000	8,00	0,0000
17	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58D Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	561 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	2,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000
18	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58D Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	561 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	2,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000
19	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	5942	58D Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	561 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret		April	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
20	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	RO Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	2,0000	0,0000	24,99	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	8,33	0,0000	

Menampilkan 11 sampai 20 dari 20 entri

[Sebelumnya](#)
1
2
Selanjutnya



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA